

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memberikan kesempatan kepada desa agar mampu mengelola sumber daya desa secara mandiri serta mengembangkan potensi desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup desa sesuai dengan peraturan pemerintah no. 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memperhatikan desa-desa di Indonesia agar dapat mengelola perekonomian secara mandiri. Pengelolaan keuangan desa dinyatakan dalam bentuk kebijakan desa yaitu berupa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/APBDes (Devi, 2020).

APBDes merupakan rencana anggaran keuangan yang disusun oleh pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan mengelola APBDes. Seperti ditunjukkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur jika APBD harus disusun oleh APBDes sesuai dengan peraturan desa untuk satu tahun anggaran. Anggaran dianggap penting mengingat bahwa anggaran merupakan alat negara untuk menggerakkan perputaran keuangan, mengatur dan mengusahakan kepuasan pribadi daerah, serta alat untuk menyusun proyek atau langkah kerja. sehingga setiap tindakan dapat diselesaikan. sangat terkoordinasi dan terkendali. APBDes adalah instrument penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa serta memastikan penggunaan dana publik yang tepat dan bertanggungjawab sesuai dengan kepentingan masyarakat desa (Suhardi et al., 2022).

Akuntabilitas publik adalah konsep yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan institusi publik lainnya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Ini melibatkan transparansi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan pengeluaran kepada publik. Pentingnya akuntabilitas publik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik bertanggung jawab dan bertindak dalam kepentingan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas publik, masyarakat dapat memantau tindakan dan keputusan pemerintah, serta memastikan sumber daya publik digunakan dengan efektif dan efisien (Saputra, Sopanah, & Hasan, 2021).

Akuntabilitas publik sering dipandang sebagai sarang inefisiensi dan pemborosan karena lembaga-lembaga publik seringkali tidak bertanggung jawab secara memadai atas penggunaan dana publik. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk mengawasi dan mempertanggungjawabkan lembaga-lembaga tersebut (Saputra, Sopanah, & Hasan, 2021). Penting untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik dalam APBDDes. Prinsip tersebut menekankan bahwasanya akuntabilitas semakin baik jika dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Hal ini berarti lembaga keuangan desa harus bisa memberikan informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh publik, sehingga publik dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan apakah digunakan dengan efisien dan efektif (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018). Akuntabilitas dalam pemerintah dinilai sangat penting karena akuntabilitas tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aktivitasnya. serta

mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Widyatama et al., 2017).

Pada kenyataannya permasalahan penyelewangan dana juga muncul di era Covid-19 yang mengubah kondisi kehidupan masyarakat selama hampir tiga tahun. Otoritas publik juga memberikan bantuan kepada khalayak yang terkena dampak. Namun kenyataannya, ada kasus mantan Menteri Sosial yang memanfaatkan bantuan publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas bagaimana pemerintah mengalokasikan dana untuk memerangi pandemi (Shahib et al., 2022). Dengan begitu akuntabilitas didalam pemerintahan menjadi penting karena pemerintah harus tanggap, partisipatif, dan profesional dalam penyelenggaraannya agar tetap terjaga kelangsungannya (Khotami, 2017). Kurangnya akuntabilitas, keterbukaan dan profesionalisme kepala desa dalam mengelola APBDes juga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa di Bengkulu. Oknum mantan kepala desa menggelapkan dana desa sebesar 300.000.000 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik, Jalan telpot dan siring pasang volume, siring pasang (*drainase*) disalahgunakan untuk keuntungan pribadi oleh kepala desa Air Kat pada tahun anggaran 2017, dan mantan kepala desa juga mengaku secara pribadi mengelola keuangan tanpa bendahara dan sekretaris desa (Supandi, 2021).

Dalam konteks akuntabilitas publik dan pengelolaan keuangan daerah, konsep *value for money* menjadi penting. Menurut Mardiasmo (2018), *value for money* merupakan konsep manajemen yang digunakan dalam organisasi sektor publik untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam pelaksanaan aktivitas. Ekonomi diukur dengan membandingkan kontribusi aktual dengan

kontribusi yang direncanakan, efisiensi diukur berdasarkan kinerja yang direncanakan, dan efektivitas diukur dengan membandingkan produksi aktual dengan produksi yang direncanakan. Implementasi konsep *value for money* dipercaya mampu meningkatkan akuntabilitas publik serta efisiensi sektor publik dengan cara meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi biaya pelayanan yang tidak efisien, meningkatkan alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan publik, serta meningkatkan kesadaran akan pengelolaan uang publik (Suhardi & Muhammad, 2022).

Namun, hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak selalu konsisten. Penelitian Abdullah (2018), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, namun penelitian Hardiningsih (2019), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif antara keduanya.

Sistem pengendalian internal yang baik, akan membuat pemerintah daerah serta lembaga keuangan mendukung konsep *value for money* dalam pengelolaan dana masyarakat. Sistem yang baik dapat memastikan keamanan aset, keandalan informasi akuntansi, efisiensi serta efektivitas kegiatan operasional (Mardiasmo, 2018). Menurut Mulyadi (2017), sistem pengendalian internal merupakan suatu kerangka kerja yang melibatkan struktur organisasi, metode, serta prosedur yang dikoordinasikan untuk mengelola aset organisasi, memastikan akurasi, keandalan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Tujuan utama dari sistem pengendalian internal efektif adalah mengurangi risiko kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal

lemah, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi yaitu keamanan aset dapat menjadi rentan terhadap kehilangan, pencurian, atau penyalahgunaan jika tidak ada pengendalian yang memadai untuk melindunginya, informasi akuntansi yang dihasilkan mungkin tidak akurat serta tidak dapat diandalkan, kegiatan operasional perusahaan mungkin tidak efektif dan efisien, serta menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. sehingga, penting bagi perusahaan agar dapat memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan efektif guna mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan kecurangan, kehilangan aset, ketidakakuratan informasi, ketidakefektifan operasional, dan ketidakpatuhan. Sistem pengendalian internal yang baik memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan bahwa perusahaan berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan (Fadhil, 2020).

Jika dalam sistem pengendalian internal, pengendalian efektif akan menunjukkan keberhasilan tercapai tidaknya tujuan,, jika hasil kegiatan lebih dekat dengan tujuan maka efektivitas pengendalian lebih tinggi, sebaliknya jika hasil kegiatan lebih dekat dengan tujuan maka efektivitas menurun. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, organisasi dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kelemahan manusia, mencegah kesalahan, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Ini memberikan perlindungan yang penting bagi organisasi dan membantu menjaga integritas dan keandalan operasionalnya (Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Maria (2020), menyimpulkan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti

bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja desa dapat ditingkatkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Djalil et al., 2017), menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal tidak dianggap sebagai faktor yang memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja desa.

Selain sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa yang kompeten harus memahami dengan baik peraturan dan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kompetensi merupakan kombinasi dari ilmu, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan. Dengan memiliki aparatur Desa yang kompeten, pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan lebih efektif serta efisien. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Selain itu, aparatur Desa yang kompeten juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah, sehingga pengelolaan anggaran desa tetap berjalan dengan baik (Sutrepti, 2022).

Aparatur desa harus mampu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Mereka harus memahami prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dan mampu mendorong partisipasi aktif dari warga desa. Selain itu, mereka juga perlu memiliki pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat dan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat desa. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Dalam penelitian Aziiz & Prastiti (2019),

menunjukkan adanya korelasi positif antara kompetensi aparatur Desa dengan akuntabilitas tata kelola dana desa. Sedangkan dalam penelitian Sweetenia et al. (2019), menyatakan, kompetensi aparatur Desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas tata kelola dana desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi aspek penting yang melibatkan berbagai faktor, termasuk kompetensi aparatur Desa.

Dalam menentukan baik buruknya kualitas pengelolaan dana desa dapat ditinjau dengan partisipasi masyarakat, karena dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa dapat mengetahui sejauh mana kebijakan keuangan desa yang berlaku sehingga pengambilan keputusan tidak bergantung pada pemerintah. Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan warga dalam sebuah proses pengidentifikasian permasalahan yang terdapat di masyarakat, penentuan cara untuk menyelesaikan masalah, ikut melaksanakan mengatasi masalah dan terlibat pada proses mengevaluasi perubahan yg terjadi (Uceng et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian dari Putra & Rasmini (2019) keikutsertaan warga masyarakat sangat berpengaruh dalam efektivitas pengelolaan keuangan desa. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana tersebut dapat ditingkatkan.

Selain itu, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak kalah pentingnya, transparansi menandakan bahwa dalam pengelolaannya, dana desa menjadi kekuatan pembangunan yang didalamnya terdapat keterbukaan baik dari segi anggaran dan penganggarannya maupun dari segi pelaksanaannya. Menurut Fajaruddin (2021), Transparansi adalah prinsip kerbukaan yang dapat membantu

masyarakat untuk mengakses sebuah informasi dengan bebas terhadap pelaksanaan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah, seperti informasi perihal ketentuan pemerintah, proses pelaksanaan serta pembuatannya, dan hasil yang diperoleh. Dalam konteks bisnis dan pemerintahan, transparansi diperlukan karena di nilai bisa menjadi contoh pengelolaan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian Djamiraga & Widajantie (2022), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Ujanmas kabupaten Muara Enim karena masih terjadi beberapa kasus kecurangan yang melibatkan dana desa, yang menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga menarik untuk diteliti. Adapun kasus pada desa-desa di kecamatan ujanmas dimana diduga terjadi korupsi oleh oknum Kepala Desa, yang dimana terjadi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) yang belum dikembalikan oleh oknum Kepala Desa di desa Ujanmas dan anggaran karang taruna yang tidak direalisasikan kepada pihak yang mengelolanya serta melencengnya dari jadwal pembuatan jalan setapak yang dimana dana anggaran cair ditahun 2022 namun baru dilaksanakan ditahun 2023 (CN, 2023 ; Nusantara, 2023).

Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada “ **Pengaruh *Value For Money*, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Publik Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa-Desa Di Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
6. Apakah *value for money*, sistem pengendalian internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh secara Bersama-sama terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?
6. Untuk mengetahui pengaruh *value for money*, sistem pengendalian internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi secara Bersama-sama terhadap akuntabilitas publik dalam anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Ujanmas?

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang pengaruh *Value For Money*, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap akuntabilitas publik dalam APBDes pada desa-desa di kecamatan ujanmas. Temuan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan dan pengembangan teori terkait.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan/kantor desa

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi kantor kepala desa di kecamatan Ujanmas dalam mengelola program, kegiatan, dan sumber daya yang tersedia. Implementasi konsep *Value For Money*, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik terhadap APBDes. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pertanggungjawaban di tingkat desa.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi atau peneliti di masa mendatang. Penelitian ini

melibatkan variabel tambahan atau melihat pengaruh lainnya yang relevan dalam konteks pengelolaan anggaran desa.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh *Value For Money*, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap akuntabilitas publik dalam APBDes pada desa-desa di kecamatan Ujanmas. Populasi penelitian yang terdiri dari, perangkat desa setiap desa dengan jumlah desa sebanyak 9 desa pada kecamatan ujanmas.

1.6. Sistematika penulisan

Dengan sistematika penulisan yang terstruktur, diharapkan laporan penelitian dapat disusun dengan baik sehingga bisa memberikan informasi yang relevan dan kontribusi dalam bidang pengetahuan, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang pemilihan judul penelitian, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan yang akan diikuti dalam laporan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disini menguraikan tentang landasan teori, hubungan antara variabel, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta definisi operasional dan pengukuran variabel.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian mengenai *Value For Money*, Sistem Pengendalian Internal, kompetensi, partisipasi masyarakat dan transparansi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian, saran dan masukan untuk kemajuan perusahaan atau penelitian selanjutnya.

